



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI



**ROADMAP
PENGEMBANGAN
JAMU**

2011–2025



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI

ROADMAP PENGEMBANGAN JAMU 2011–2025

JAKARTA, 2011

ROADMAP PENGEMBANGAN JAMU 2011–2025

Copyright © 2011 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Desain Cover : Andri Alamsyah
Lay Out : Andri Alamsyah

Diterbitkan oleh :
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI

Di cetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia
Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

KATA PENGANTAR

Sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu nenek moyang kita telah memanfaatkan berbagai jenis tanaman dan tumbuhan ataupun hewan untuk pengobatan dalam menjaga kesehatannya. Hal ini dapat ditelusuri dalam bukti-bukti melalui alat-alat batu pembuat jamu, prasasti, relief candi, naskah kuno dan produk-produk lainnya.

Dalam rangka untuk mewariskan budaya nenek moyang kita, yang disesuaikan dengan budaya pada saat ini, melalui penggunaan bahan baku yang sama dengan cara yang modern. Dengan berbagai pendekatan modern, produk jamu untuk kesehatan dilakukan dalam bentuk produk makanan, minuman, kosmetik, minyak, dan kapsul dll.

Penyusunan roadmap pengembangan jamu melalui pembahasan yang intensif oleh tim yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah dan tenaga ahli, serta diperkuat oleh para *stakeholder* perjamuan melalui berbagai rapat koordinasi. Roadmap pengembangan jamu diadakan dalam rangka sebagai arah pedoman pada pengelolaan kebijakan jamu nasional. Dalam Roadmap Pengembangan Jamu 2011-2025, berbagai hal diuraikan mulai dari bahan baku, SDM, penelitian, industri, kelembagaan dan pembiayaan, promosi sampai dengan HAKI.

Dengan tersusunnya Roadmap Pengembangan Jamu 2011-2025 ini diharapkan seluruh *stakeholder* perjamuan nasional dapat memiliki arah dan pedoman yang sama dalam meraih sasaran Jamu Brand Indonesia.

Akhirnya tidak lupa kami haturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan perjamuan nasional dan semua pihak terkait yang telah membantu tersusunnya Roadmap Pengembangan Jamu. Disadari bahwa masih mungkin terdapatnya berbagai kekurangan dalam penyusunan roadmap ini, oleh karenanya kami sangat mengharapkan evaluasi dan monitoing dari berbagai pihak terkait, untuk menjadi bahan review penyempurnaan roadmap pengembangan

jamu. Roadmap pengembangan jamu dapat direview yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang terjadi.

Jakarta, 2011

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
ROADMAP PENGEMBANGAN JAMU INDONESIA	1
I. DASAR PEMIKIRAN.....	3
II. VISI, MISI DAN TUJUAN	7
III. FAKTOR STRATEGIS PENGEMBANGAN	9
IV. ROADMAP PENGEMBANGAN JAMU 2011-2025	29
MATRIKS ROADMAP PENGEMBANGAN JAMU INDONESIA	37





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI

ROADMAP
PENGEMBANGAN JAMU
2011–2025





I

DASAR PEMIKIRAN

Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyat serta duta kebanggaan bangsa. Istilah **Jamu** berasal dari kata **djampi** dan **oesodo** yang telah dikenal masyarakat sejak jaman dahulu, merupakan *way of life* dan budaya bangsa Indonesia. Perkembangan peradaban bangsa Indonesia juga telah memperkaya khasanah Jamu. Jamu telah dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, misalnya pada peradaban Hindu, Budha dan peradaban asli lainnya. Jamu juga banyak tercatat pada beberapa simbul budaya seperti candi (Borobudur dan Prambanan), karya sastra nenek moyang (serat centini), budaya masyarakat Bali, budaya Melayu, peradaban Islam dan beberapa literatur bangsa Arab dan Persia. Dalam perkembangannya istilah **Jamoe** kemudian mengalami penyesuaian ejaan yang disempurnakan (EYD) sehingga menjadi **Jamu** seperti yang dikenal masyarakat sekarang ini.

Jamu memiliki nilai historis, menjaga dan mengembangkan warisan leluhur bangsa Indonesia (*traditional knowlegde*) yang dikenal luas masyarakat. Jamu merupakan warisan turun-temurun yang bersumber pada kekayaan alam. Bukti empirik menunjukkan bahwa Jamu dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, utamanya dalam upaya promotif dan preventif.

Jamu Indonesia memiliki **keunggulan komparatif** yang tinggi karena berasal dari keragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat serta keragaman hayati yang sangat tinggi. Jamu juga merupakan produk **ekonomi kreatif** bangsa Indonesia yang berbasis budaya turun- temurun dan sudah saatnya diusulkan sebagai salah satu **World Heritage**. Jamu sebagai **aset nasional** mempunyai dimensi manfaat yang luas diantaranya **kesehatan, perekonomian** dan **sosial budaya**. Sudah saatnya Jamu Indonesia dikembangkan menjadi **komoditi yang kompetitif** baik ditingkat **lokal, regional** maupun **global**.

Pada Gelar Kebangkitan Jamu tahun 2008, Presiden Republik Indonesia menyampaikan empat hal penting terkait dengan pengembangan Jamu yaitu: **1) membangun sistem yang integratif melalui pengembangan dan pengintegrasian Jamu ke dalam sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berlaku; 2) meningkatkan penelitian dan inovasi teknologi pengembangan Jamu; 3) mendorong industri Jamu untuk masuk ke dalam *mainstream* pasar global dan pasar dalam negeri serta yang juga sangat penting adalah *branding* Indonesia untuk produk Jamu; dan 4) mendorong berkembangnya usaha Jamu melalui usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.**

Dalam rangka merumuskan kebijakan dan implementasi teknis dari arahan Presiden tersebut, pengembangan Jamu dari aspek kesehatan, pendidikan dan budaya akan dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan aspek ekonomi dan bisnis mulai dari kemandirian bahan baku, pengembangan industri, investasi dan promosi “Jamu” pada tingkat global akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Meningkatnya kecenderungan masyarakat global untuk *back to nature* menuntut tersedianya produk bahan alam yang berkualitas, praktis dan sesuai dengan pola hidup modern. Jamu merupakan salah satu produk bahan alam yang harus berkompetisi dengan produk bahan alam sejenis dari negara lain. Adanya kesepakatan global dan regional dalam tata kelola perdagangan berbagai produk konsumsi termasuk produk obat bahan alam, merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi pengembangan produk Jamu. Untuk itu upaya **meningkatkan daya saing industri** dan **produk Jamu** merupakan langkah penting yang harus dilakukan.

Ada beberapa kendala dalam pengembangan Jamu Indonesia, diantaranya masih lemahnya koordinasi lintas sektor terkait dalam pengembangan Jamu, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Jamu yang belum optimal, jumlah dan kompetensi SDM Jamu yang masih kurang dan dukungan regulasi serta kebijakan yang kurang kuat sebagai landasan formal serta acuan dalam implementasi.

Untuk dapat mewujudkan Jamu sebagai komoditi yang kompetitif ditingkat global, diperlukan **arah pengembangan Jamu** ke depan yang jelas disertai dengan

langkah strategis yang dapat diukur capaiannya. Visi pengembangan Jamu sangat diperlukan, dilanjutkan dengan perumusan misi dan tujuan pengembangan Jamu yang diterjemahkan dalam bentuk program yang sistematis dengan sasaran yang terukur untuk pengembangan Jamu tradisional, Jamu terstandar, fitofarmaka, Jamu saintifik, dan produk minuman, makanan kesehatan, serta kebugaran. Untuk itu acuan arah dan tahapan pelaksanaan perlu dituangkan dalam bentuk **tapak jalan (road map)** yang lebih rinci dan komprehensif.

Roadmap Pengembangan Jamu (RPJ) merupakan penuntun arah, tujuan dan tahapan pengembangan Jamu Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. RPJP 2011-2025 merupakan acuan dan penuntun teknis tahapan pengembangan Jamu secara komprehensif yang dirumuskan dari visi, misi dan program jangka pendek, menengah dan panjang pengembangan Jamu Indonesia. Roadmap ini akan dijadikan acuan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan kompetensi, tupoksi dan kewenangan masing-masing.

Target capaian pengembangan Jamu ditetapkan berdasarkan capaian jangka pendek (2011-2015), jangka menengah (2016-2020), dan jangka panjang (2021-2025). Pada setiap jangka capaian dapat dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan arah pengembangan selanjutnya, agar tujuan tahun 2025 dapat dicapai. Untuk mencapai target capaian tersebut diperlukan sinergi antar semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku bisnis/industri, dan masyarakat.

Dengan kesamaan cara pandang dan komitmen dari semua stakeholders dalam melaksanaan *roadmap* ini, “**Jamu Indonesia menjamin Kualitas Hidup Dunia**” akan dapat terwujud.



II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Jamu Indonesia menjamin Kualitas Hidup Dunia

2.2. MISI

1. Meningkatkan keamanan, khasiat-manfaat dan mutu Jamu
2. Meningkatkan kemandirian bahan baku Jamu
3. Mengembangkan industri Jamu berkelas dunia
4. Memantapkan pasar lokal dan mendorong pasar global
5. Meningkatkan pemanfaatan Jamu dalam pelayanan kesehatan
6. Jamu sebagai *brand image* bangsa Indonesia

2.3. TUJUAN

Pengembangan Jamu Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Jamu Indonesia yang aman, berkhasiat dan bermutu dengan dukungan industri yang mandiri dan berdaya saing pada pasar global dan terlaksananya integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. ARAH

Arah pengembangan jamu nasional terbagi ke dalam 4 yaitu :

1. Pengembangan jamu untuk kesehatan (fitofarmaka)
2. Pengembangan jamu untuk kecantikan dan kebugaran
3. Pengembangan jamu untuk makanan dan minuman
4. Pengembangan jamu untuk wisata dan keagamaan



III

FAKTOR STRATEGIS PENGEMBANGAN

3.1. FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL

Pada era globalisasi dewasa ini kecenderungan pemanfaatan obat herbal telah meluas ke seluruh dunia, dan dikenal sebagai *trend* gaya hidup kembali ke alam (*back to nature*). Indonesia, dengan keanekaragaman hayati yang melimpah dan belum termanfaatkan secara optimal, mempunyai peluang yang tinggi untuk mengambil peran melalui pengembangan industri *herbal medicine* dan *health food* yang berorientasi ekspor.

Pasar herbal dunia pada tahun 2008 sekitar US\$ 60 miliar dengan pasar terbesar adalah di Asia (39%), diikuti oleh Eropa (34%), Amerika Utara (22%) dan belahan dunia lainnya sebesar 5%. Nilai pasar tersebut akan terus meningkat dan diperkirakan mencapai US\$ 150 miliar pada tahun 2020. Dari total nilai perdagangan produk obat herbal dunia tersebut, omzet penjualan produk obat herbal Indonesia baru mencapai US\$ 100 juta per tahun (0,22%) yang tentunya memiliki peluang besar untuk ditingkatkan. Pertumbuhan pasar obat herbal di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang bermakna. Pada tahun 2003 nilai pasar obat herbal di Indonesia sebesar 3 triliun rupiah, meningkat menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2006, dan 7,2 triliun pada tahun 2008. Pada tahun 2010 nilai pasar obat herbal Indonesia sudah mencapai 10 triliun rupiah. Sampai dengan tahun 2010 tercatat jumlah industri di bidang Obat Tradisional sebanyak 1908 terdiri dari 79 Industri Obat Tradisional (IOT), 1413 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) dan 416 industri rumah tangga (PIRT). Potensi pengembangan Jamu sangat tinggi, Jamu bisa masuk dalam *mainstream* pasar global dengan memberdayakan secara optimal *economic* dan *business opportunities*.

Cina merupakan produsen obat herbal terkemuka, yang dikenal dengan *Traditional Chinese Medicine* (TCM). Ada sekitar 1200 industri TCM, 600 diantaranya mempunyai budidaya tanaman obat yang terintegrasi dengan pabrik. Total nilai

pasar domestik TCM mencapai sekitar US\$ 5 miliar dan nilai pasar ekspor mencapai USD 1 miliar. TCM sudah diaplikasikan secara pararel dan komplementer dengan obat modern, dimana 1.249 produk TCM sudah dimasukkan dalam daftar obat esensial nasional. Buku Materia Medica Cina memuat lebih dari 7.000 spesies tumbuhan obat.

Farmakope Herbal Indonesia edisi I dikeluarkan oleh Kemenkes pada tahun 2008 baru memuat 37 monografi simplisia dan 33 monografi ekstrak. Sedangkan pada Farmakope Herbal Suplemen I memuat 55 monografi terdiri dari 26 simplisia dan 29 ekstrak.

Jerman merupakan negara maju Eropa yang memberikan perhatian cukup besar terhadap pengembangan dan pemanfaatan obat-obatan berbasis bahan alam. Penelitian dan pemanfaatan obat-obatan bahan alam di Jerman (disebut *phytomedicines*) sudah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2009, nilai pasar obat-obatan dari bahan alam di negara ini mencapai nilai €1,18 miliar yaitu sekitar 22% dari total nilai pasar obat non-resep di Jerman. Menurut hasil penelitian dari *Allensbach Institut* pada tahun 2002, tercatat 73% penduduk Jerman telah menggunakan obat-obatan dari bahan alam. Obat-obatan dari bahan alam dijual secara bebas dan menggunakan resep dokter di apotek. Nilai penjualan obat-obatan dari bahan alam pada apotek-apotek di Jerman sekitar 30% dari total nilai penjualan obat-obat bebas. Di Jerman obat-obatan dari bahan alam termasuk di antara 2.000 jenis obat yang terbanyak ditulis dalam resep dokter dan sudah masuk daftar asuransi kesehatan.

3.2. FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

Upaya pengembangan Jamu merupakan rangkaian kegiatan yang panjang dengan berbagai permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, upaya pengembangan Jamu harus dilakukan dengan langkah-langkah terpadu, komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan semua stakeholders (pemerintah, peneliti, pelaku usaha, kalangan profesi dan masyarakat) dengan tetap berlandaskan pada kewenangan dan tugas, keahlian dan kemampuan masing-masing.

Potensi pengembangan bisnis Jamu di dalam negeri sendiri terbuka lebar dengan adanya kebiasaan menkonsumsi Jamu masyarakat Indonesia. Survey perilaku konsumen dalam negeri menunjukkan 61,3% responden mempunyai kebiasaan meminum Jamu. Hal ini menunjukkan bahwa budaya minum Jamu yang merupakan tradisi leluhur sebagian bangsa Indonesia sudah memasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperluas cakupan upaya pelayanan pengobatan tradisional secara bertahap ke pelayanan kesehatan formal. Adanya pencanangan “Gelar Kebangkitan Jamu Indonesia” pada tahun 2008 oleh Presiden RI, diharapkan menjadi momen kebangkitan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi Jamu dan mendorong berkembangnya industri Jamu. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa lebih dari separuh (55,3%) penduduk Indonesia menggunakan Jamu dan 95%-nya menyatakan bahwa Jamu bermanfaat.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan Jamu di Indonesia, sektor kesehatan telah merumuskan program integrasi pelayanan kesehatan tradisional pada pelayanan kesehatan formal. Pada tahun 2010, program integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan telah dilaksanakan pada 12 Rumah Sakit (RS) dan akan terus dilanjutkan sesuai dengan target renstra Kementerian Kesehatan menjadi 70 RS. Pada tingkat kabupaten/kota target integrasi Jamu pada layanan kesehatan pada 2011 diharapkan bisa mencapai 20% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 50% minimal pada 2 Puskesmas pada tiap kabupaten/kota.

Dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 48 dinyatakan bahwa “pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan”. Artinya, pengobatan tradisional (*indigenous health system*) diakui sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan (*health care system*). Untuk itu, perlu “**sinkronisasi**” antara sistem pelayanan kesehatan formal dan sistem pelayanan kesehatan tradisional. Pada Pasal 101, disebutkan bahwa sumber obat tradisional yang terbukti berkhasiat dan aman, harus dijaga kelestariannya. Dengan demikian, pembuktian empiris terkait khasiat dan keamanan obat tradisional (Jamu) merupakan hal penting dalam menjadikan Jamu sebagai komponen dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan kata lain, litbang di bidang Jamu merupakan salah satu “upaya penting” dalam mengangkat Jamu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Riset tentang Jamu telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian baik yang berada di Litbang berbagai Kementerian terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, pihak swasta/industri, dan masyarakat. Namun demikian, hasil yang diperoleh belum tersosialisasi dengan baik dan ditindaklajuti secara terpadu, sehingga banyak hasil riset dan penelitian yang belum dimanfaatkan dengan baik.

Ada beberapa kendala dalam pengembangan Jamu Indonesia, diantaranya adalah kurangnya koordinasi lintas sektor terkait dalam pengembangan Jamu dan belum tersusunnya target pengembangan Jamu yang akan dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan. Selain itu aspek pengadaan bahan baku juga belum digarap dengan baik. Budidaya tumbuhan obat belum berkembang, terlihat dari masih tingginya kegiatan eksploitasi tumbuhan obat dari hutan, penanganan pasca panen yang kurang tepat, terbatasnya dukungan IPTEK, rendahnya kepedulian petani untuk budidaya tumbuhan obat karena iklim usaha dan tataniaga simplisia tanaman obat yang belum tertata dengan baik. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan yang jelas dan terarah dengan dukungan regulasi yang kuat. Diperlukan kebijakan iklim usaha tanaman obat (Jamu) yang dapat menarik petani melakukan budidaya tanaman obat, antara lain dengan menciptakan transparansi kebutuhan bahan baku baik untuk industri, Jamu gendong, rumah tangga serta kebutuhan ekspor. Hal ini diperlukan untuk menjalin mekanisme *supply* dan *demand* dengan baik serta membentuk pasar tanaman obat, sehingga dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha Jamu agar mampu memenuhi persyaratan dan memiliki daya saing pada era globalisasi.

3.3. Langkah-langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan dan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Jamu di Indonesia :

- a. Kementerian Kesehatan melalui program Saintifikasi Jamu telah melakukan kegiatan pelatihan dokter secara regular untuk meningkatkan kompetensi dan legitimasi dalam memanfaatkan Jamu dalam pelayanan kesehatan formal. Tantangan yang dihadapi adalah belum tersusunnya regulasi formal sebagai payung hukum dan secara operasional jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandar dan bermutu belum ada. Untuk itu penyiapan payung hukum dan

upaya penyediaan bahan baku yang terstandar dan bermutu untuk mendukung program saintifikasi Jamu merupakan salah satu program utama dalam *roadmap* pengembangan Jamu.

- b. Kementerian Pertanian dengan acuan UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, dapat mendorong pengembangan tanaman hortikultura khususnya tanaman obat sebagai komoditi tanaman unggulan. Tantangan yang dihadapi adalah tanaman obat secara komersial belum banyak menarik minat petani, karena belum adanya jaminan pasar dan kelayakan harga simplisia tanaman obat sebagai akibat belum tertatanya tata niaga simplisia tanaman obat yang berpihak pada petani. Adanya program saintifikasi Jamu diharapkan dapat membuka potensi pasar dan mendorong tumbuhnya budidaya tanaman obat serta terjalannya kemitraan antara petani dan industri Jamu.
- c. Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan dan Pemanfaatan Obat Asli Indonesia (OAI) sebagai salah satu payung hukum pengembangan Jamu sedang dalam pembahasan di DPR dan Kementerian Kesehatan merencanakan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelayanan kesehatan tradisional.
- d. Kementerian Kehutanan menjadikan pengembangan tanaman obat sebagai salah satu kegiatan dalam FEM (*Food, Energy, Medicine*). Peran Kementerian Kehutanan dalam pengembangan Jamu utamanya dalam aspek penyediaan bahan baku. Sampai saat ini telah berhasil diidentifikasi beberapa tanaman hutan yang berkhasiat obat, sebagian diantaranya telah berhasil dibudidayakan untuk tujuan komersial. Selain itu pemanfaatan lahan hutan industri melalui sistem tumpang sari dapat mendorong pengembangan bahan baku Jamu.
- e. Seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat global dan meningkatnya kompetisi produk berbasis herbal, peran teknologi untuk meningkatkan kualitas produk Jamu sangat diperlukan. Kementerian Riset dan Teknologi telah menempatkan pengembangan iptek obat alami untuk mendukung klaster industri kesehatan dan industri farmasi nasional sebagai salah satu prioritas pengembangan iptek bidang kesehatan yang dituangkan dalam kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2010–

2014. Selain pengembangan produk obat alami berbasis tanaman obat, upaya eksplorasi dan pemanfaatan biota laut sebagai sumber senyawa alam aktif dan bahan baku produk alami perlu ditingkatkan.

- f. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam rangka mendorong peningkatan keamanan, khasiat-manfaat dan mutu produk Jamu serta pengawasan pre- dan post-marketing.
- g. Perguruan tinggi dan lembaga litbang telah melakukan berbagai riset pengembangan Jamu dari aspek budidaya tanaman obat, paska panen, proses ekstraksi dan standarisasi, pengujian khasiat dan keamanan produk dan pengembangan formulasi sediaan. Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah belum terjadi ***link and match*** antara hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dengan kebutuhan industri Jamu. Untuk itu pengembangan produk Jamu melalui pendekatan kemitraan antara perguruan tinggi/lembaga riset dengan industri merupakan langkah penting yang harus dilakukan.

3.4. INSTRUMEN PELAKSANAAN

3.4.1. Instrumen Legislasi

Payung regulasi :

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Kepres RI No 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen.
3. Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional
4. Kepmenkes No 1109 Tahun 2009 tentang pengobatan komplementer Alternatif
5. SK MENKES RI No. 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional.

Regulasi tentang bahan baku :

1. UU No 12 Tahun 1999 tentang Sistem Budidaya Pertanian
2. UU No. 18/ 2005 tentang Litbang Perkebunan



3. UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 551/kpts/2006 tentang Komoditas Binaan Departemen Pertanian
5. Peraturan Menteri Pertanian no 44 tahun 2009 tentang pedoman penanganan pasca panen yang baik
6. Peraturan Menteri Pertanian no 44 tahun 1996 tentang perbenihan tanaman

Regulasi tentang industri :

1. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. PP No 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

Regulasi tentang IPTEK :

1. PP No. 35 Tahun 2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan Badan Usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan., inovasi, dan defuse teknologi
2. PP No 35 tahun 2007 tentang Pengalokasian sebaigai pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perkeyasaan, inovasi dan difusi teknologi
3. Perpres No 30 tahun 2010 tentang Komisi kemanan hayati produk rekayasa genetic
4. Perpres No 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional
5. Permenkes No. 003/Menkes/Per/I/2010 tentang saintifikasi Jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan
6. Kepmen Ristek NOMOR 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2010-2014

Regulasi terkait pengawasan dan distribusi :

1. PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
2. Keputusan kepala Badan POM RI No: HK.00.05.4.2411 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia.
3. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.4.1380 tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik.

4. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.41.1384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka

Kelompok regulasi terkait HaKI :

1. UU no 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
2. UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
4. UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten
6. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
7. UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

3.4. 2. Instrumen Kelembagaan

1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Negara / BAPPENAS
4. Kementerian Hukum dan HAM
5. Kementerian Pendidikan Nasional
6. Kementerian Riset dan Teknologi
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kesehatan
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Perindustrian
12. Kementerian Perdagangan
13. Kementerian Luar Negeri
14. Kementerian Dalam Negeri
15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
16. Kementerian Negara Lingkungan Hidup



17. Kementerian Negara Koperasi dan UMKM
18. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
19. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
20. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
21. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
22. Pemerintah Daerah
23. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
24. Kementerian Komunikasi dan Informatika
25. Kementerian Sosial
26. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
28. Kementerian Pekerjaan Umum
29. Kementerian Perhubungan
30. Kementerian Negara BUMN
31. Badan Koordinasi Penanaman Modal
32. Badan Peningkatan Ekspor Nasional
33. Badan Pengawas Obat dan Makanan
34. Perguruan Tinggi
35. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
37. Asosiasi dan Organisasi yang terkait
38. Kamar Dagang Indonesia
39. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ NGO)
40. Gabungan Pengusaha Jamu

3.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)

Beberapa faktor strategis eksternal dan internal yang merupakan **kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman** dalam pengembangan Jamu adalah sebagai berikut :

3.5.1. KEKUATAN

- a. Kuatnya tradisi kebudayaan bangsa Indonesia yang terkait dengan penggunaan Jamu merupakan pasar produk Jamu.
- b. Kesesuaian kondisi agroklimat di wilayah Indonesia untuk pengembangan bahan baku Jamu
- c. Keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya untuk flora (30.000 spesies tanaman dan sekitar 940 spesies digunakan sebagai Jamu)
- d. Banyaknya Industri di bidang obat tradisional (1413 IKOT dan 79 IOT)
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung pengembangan Jamu .

3.5.2. KELEMAHAN

- a. Belum optimalnya pengetahuan dan ketrampilan SDM.
- b. Belum adanya jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bahan baku Jamu
- c. Belum sinkronnya arah penelitian dan pengembangan antar lembaga
- d. Terbatasnya kebijakan dan regulasi yang mendukung
- e. Lemahnya sistem pembiayaan dan permodalan.
- f. Belum tertatanya Rantai Pasokan Pasar "*Supply Chain Management*".
- g. Belum cukup tersedianya Infrastruktur yang memadai
- h. Belum terbangunnya sistem informasi dan *database*
- i. Belum optimalnya sistem pengawasan peredaran produk Jamu

3.5.3. PELUANG

- a. Perubahan pola hidup kembali ke alam (*back to nature*) sehingga meningkatkan *trend* penggunaan Jamu
- b. Program saintifikasi Jamu
- c. Program integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan
- d. Tingginya potensi pasar lokal dan global
- e. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- f. Mempercepat pencapaian target MDGs di Indonesia

3.5.4. ANCAMAN

- a. Munculnya pesaing produk terutama dari luar negeri sebagai dampak dari globalisasi dan harmonisasi.
- b. Degradasi plasma nutfah karena lemahnya perlindungan, pengawasan, dan kelestarian.
- c. Maraknya Jamu ilegal dan yang mengandung bahan kimia obat (BKO).
- d. Masuknya tenaga kerja asing dalam pelayanan kesehatan.

3.6. STRATEGI DASAR

3.6.1. PRIORITAS PROGRAM PENGEMBANGAN JAMU

3.6.1.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) (*Humanware*) merupakan salah satu unsur penting dalam membangun daya saing bangsa, termasuk daya saing industri Jamu. Kepedulian dan pemahaman tentang Jamu sebagai asset nasional harus ditumbuhkan pada masyarakat utamanya generasi muda. Untuk menciptakan Jamu sebagai produk kebanggaan bangsa yang berdaya saing dan mendunia diperlukan SDM Jamu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan landasan filosofi yang kuat serta komitmen yang tinggi.

3.6.1.2. Penguatan kelembagaan dan regulasi

Kelembagaan (*organware*) merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan dan menciptakan daya saing bangsa. Penataan, koordinasi dan strukturisasi merupakan langkah penting untuk penguatan lembaga sebagai instrumen atau organ pencapaian suatu misi. Regulasi atau kebijakan merupakan output utama dari lembaga sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Peningkatan peran, fungsi dan program serta koordinasi dari lembaga-lembaga yang terkait dalam pengembangan Jamu sangat diperlukan untuk menghasilkan regulasi dan kebijakan lain yang bisa mendorong Jamu sebagai asset nasional yang dibanggakan dan mendunia.

3.6.1.3. Pengembangan bahan baku terstandar dan bermutu

Jamu merupakan produk kesehatan yang harus memenuhi persyaratan aman, berkhasiat dan berkualitas. Pengembangan Jamu dalam skala komersial

membutuhkan ketersediaan bahan baku dalam jumlah cukup, kontinyu dan harus memenuhi persyaratan mutu. Tanaman obat mempunyai sifat lokal spesifik, yaitu kesesuaian agroklimat dan lingkungan tumbuh yang berbeda-beda. Untuk itu pengembangan teknologi budidaya dan sistem industri bahan baku tanaman obat (agroindustri) perlu diwujudkan untuk menghasilkan bahan baku Jamu yang bermutu dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.

3.6.1.4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)

Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, dan mengembangkan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk menghasilkan teknologi, salah satu diantaranya teknologi kesehatan dan teknologi standardisasi bahan baku. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga, sumberdaya iptek, memperkuat jejaring kelembagaan, meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian merupakan arah pengembangan iptek yang sudah ditetapkan dan perlu segera diwujudkan, termasuk iptek yang terkait langsung dengan pengembangan Jamu. Teknologi merupakan paduan antara ilmu pengetahuan, rekayasa (*engineering*) dan seni (*art*). Teknologi (*technoware*) merupakan unsur utama dalam membangun kemandirian dan daya saing industri, termasuk industri Jamu dan daya saing bangsa.

3.6.1.5. Pengembangan industri Jamu

Industri Jamu meliputi industri bahan baku (*hulu*), industri manufaktur (*hilir*) dan industri perantara atau pendukung lainnya, seperti industri alat dan mesin, pengemas, marketing, promosi (iklan) dan lain-lain. Struktur industri Jamu nasional belum kuat, utamanya dari aspek bahan baku, teknologi dan permodalan serta masih terkonsentrasi industri Jamu di Jawa. Komposisi industri kecil, menengah dan besar yang kurang proposisional juga memperlambat peningkatan daya saing industri Jamu nasional. Untuk itu perlu adanya regulasi dan program pembinaan yang tepat dan komprehensif, penguatan teknologi dan permodalan, serta *clustering* untuk mendorong kemajuan industri Jamu nasional agar mempunyai daya saing yang kuat.

3.6.1.6. Promosi, peningkatan dan perluasan pasar global

Pengakuan dunia akan produk Jamu dan penguasaan pasar global yang signifikan merupakan target utama pengembangan Jamu. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan dan promosi Jamu secara intensif dengan berbagai media dan sumber daya yang ada. Peran lembaga terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan citra (politik) Jamu sebagai asset nasional yang patut dibanggakan serta dukungan program promosi yang sistematis dan berkelanjutan

3.6.1.7. Peningkatan pemanfaatan dan integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan

Pengembangan Jamu diarahkan pada sinergi dengan sistem pelayanan kesehatan formal dan mendorong penggunaan Jamu secara rasional. Program saintifikasi Jamu merupakan terobosan untuk mendapatkan bukti ilmiah kemanfaatan Jamu dalam pelayanan kesehatan. Dalam upaya sinkronisasi dan integrasi penggunaan Jamu dalam sistem pelayanan kesehatan formal diperlukan pemantapan kebijakan, penyediaan bahan berkualitas dan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat dan produk Jamu. Disamping itu sosialisasi kepada masyarakat tentang program saintifikasi Jamu dan konsep integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk mempercepat target realisasi dari program tersebut.

3.6.1.8. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan

Sekitar 80% industri Jamu merupakan industri kecil (rumah tangga) dan industri menengah. Selain keterbatasan SDM, teknologi dan akses informasi, industri kecil ini juga sangat terbatas dalam permodalan. Hadirnya lembaga keuangan yang kuat dengan skema permodalan yang menarik dan berpihak pada industri kecil sangat dibutuhkan. Dengan dukungan fasilitas akses permodalan, peluang industri Jamu untuk berkembang dan meningkatkan kinerja, produktivitas dan daya saing sangat terbuka.

3.6.1.9. Pengembangan sistem informasi dan perlindungan HKI Jamu

Untuk meningkatkan daya saing industri Jamu, sistem informasi (*infoware*) sangat dibutuhkan, sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan strategi bisnis. Lemahnya sistem informasi Jamu saat ini menyebabkan kurang tepatnya

implementasi kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program. Pembangunan sistem informasi Jamu yang terpadu sangat dibutuhkan oleh seluruh stake holders. Disamping itu, potensi unsur HKI dalam produk Jamu sangat beragam . Hak atas kekayaan intelektual (HKI) tersebut sangat erat kaitannya dan potensi bisnis dan perekonomian.Untuk itu peningkatan kepedulian, pemahaman dan keinginan untuk aplikasi HKI dari seluruh aspek pengembangan Jamu, baik HKI dalam bentuk hak cipta maupun hak kekayaan industri (merek, indikasi geografis, disain industri,disain tata letak dan sirkit terpadu, paten dan rahasia dagang) oleh industri ataupun lembaga litbang perlu segera dilakukan.

3.6.1.10. Pelestarian budaya pemanfaatan Jamu

Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyat serta duta kebanggaan bangsa. Jamu Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tinggi karena berasal dari keragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat serta keragaman hayati yang sangat tinggi. Upaya sosialisasi dan pemahaman tentang Jamu pada masyarakat dan generasi muda sangat diperlukan agar Jamu bisa menjadi bagian dari budaya hidup bangsa Indonesia. Disamping itu, upaya pelestarian Jamu secara komprehensif juga harus ditingkatkan untuk menjaga dan mempertahankan budaya dan warisan leluluh ini dari serbuan budaya asing.

3.7. SASARAN

3.7.1. Jangka Pendek (2011-2015)

1. Penerapan budidaya terstandar (GAP/GACP) tanaman obat unggulan dan yang mempunyai potensi pasar.
2. Terintegrasinya program Saintifikasi Jamu (Kemenkes) dengan *stakeholder*
3. Terwujudnya Undang-undang Pemanfaatan Obat Asli Indonesia/Jamu dan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
4. Tersusunnya kurikulum pendidikan Jamu di Perguruan Tinggi.
5. Terintegrasinya Jamu kedalam layanan kesehatan di rumah sakit dan PUSKESMAS
6. Memperkuat jejaring kerjasama lintas sektor.

7. Terbangunnya sistem informasi nasional, termasuk dokumentasi data dan informasi.
8. Terlaksananya budidaya yang baik tanaman obat unggulan yang memiliki potensi pasar.
9. Tersusunnya konsep pendidikan batra dan sertifikasinya
10. Terlatihnya petani untuk melakukan budidaya tanaman obat berdasarkan GAP/GACP
11. Tersusunnya *state of the art Jamu* sebagai upaya menyelamatkan *indigenous knowledge* (warisan budaya dan pengetahuan bangsa)
12. Terbangunnya lembaga penjamin mutu bahan baku Jamu
13. Meningkatnya jumlah tanaman obat terstandar
14. Berkembangnya Taman Obat Keluarga (TOGA) dan pemanfaatannya terutama di daerah bermasalah kesehatan , dan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
15. Promosi :
 - a. Globalisasi Jamu *Brand* Indonesia 2011
 - b. Simposium Internasional Temulawak Tahun 2011
 - c. Festival Jamu Tahun 2011
 - d. ASEAN Conference on Traditional Medicine Tahun 2011
 - e. Gerakan Nasional Pemanfaatan Jamu
 - f. Pengusulan Jamu sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia (*World Heritage*)
 - g. Workshop *Traditional Medicine and Health Supplement*

3.7.2. Jangka Menengah (2015-2020)

- a. Terbangunnya kelembagaan layanan teknologi yang mendukung sistem penyediaan bahan baku terstandar dan berskala industri.
- b. Meningkatnya jumlah Jamu tradisional yang tersaintifikasi, Jamu herbal terstandar dan Jamu fitofarmaka.
- c. Terbangunnya sistem standarisasi produk herbal/Jamu.
- d. Terbangunnya sistem layanan kesehatan berbasis herbal (implementasi

kurikulum Jamu dalam pendidikan kedokteran herbal, perawat, farmasi, dan pendidikan kesehatan).

- e. Terbangunnya sistem tata-niaga bahan baku dan produk Jamu
- f. Implementasi Undang-undang Pemanfaatan Obat Asli Indonesia/Jamu
- g. Penyempurnaan regulasi tentang pelayanan kesehatan.
- h. Berkembangnya industri Jamu yang menerapkan CPOTB
- i. Peningkatan pangsa pasar Jamu di tingkat lokal dan regional.

3.7.3. Jangka Panjang (2020- 2025)

- a. Diversifikasi produk Jamu berskala dunia yang mendorong berkembangnya agro-industri/pengembangan kawasan Jamu.
- b. Perluasan program terintegrasinya produk Jamu ke dalam pelayanan kesehatan formal.
- c. Pencapaian pangsa pasar regional dan dunia di atas 25 %.
- d. Produk Jamu sebagai salah satu pilar penghela pertumbuhan perekonomian nasional.
- e. Industri di bidang obat tradisional yang memenuhi Standar CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik).
- f. Terwujud dan terjaganya kelestarian sumberdaya daya alam dan kearifan lokal.

3.8. AKTIVITAS PENGEMBANGAN

3.8.1. Pengembangan sumber daya manusia

- a. Pengembangan kurikulum pendidikan dokter herbal, tenaga paramedis, teknisi Jamu, farmasi, pertanian dalam arti luas, dan MIPA
- b. Pelatihan budidaya tanaman obat berbasis GAP/GACP dan penanganan pasca panen
- c. Penerapan CPOTB, GMP yang diacu oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- d. Diseminasi pengetahuan Jamu kepada masyarakat

3.8.2. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

- a. Koordinasi lintas sektor terkait dengan implementasi *roadmap* pengembangan Jamu di kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga penelitian, swasta/industri
- b. Regulasi yang mendorong pengembangan Jamu
 - Pemantapan regulasi terkait dengan perlindungan tenaga medis, para medis, dan konsumen.
 - Regulasi implementasi kurikulum pendidikan formal/non formal terkait Jamu (Kemendiknas dan Kemenkes)
 - Regulasi yang menguatkan pangsa pasar dalam negeri, mendorong ekspor, mengatur produk impor.
 - Regulasi ekspor-impor bahan baku dan produk Jamu

3.8.3. Pengembangan bahan baku terstandar dan bermutu

- a. Pemetaan wilayah produksi dan peta wilayah kesesuaian lahan pengembangan budidaya berdasarkan iklim (bioregional).
- b. Pembuatan SOP atau pedoman teknis budidaya berdasarkan GAP/GACP.
- c. Membangun sistem pembinaan petani berdasarkan klaster.
- d. Standarisasi dan inventarisasi kebutuhan bahan baku
- e. Mengembangkan regulasi dan infrastruktur pengembangan bahan baku dan proses pasca panen.
- f. Sertifikasi lembaga penjaminan mutu bahan baku.
- g. Koordinasi pengembangan bahan baku terstandar dengan *stakeholder*
- h. Mengembangkan sistem pendanaan yang *pro-growth* dan *pro-poor*

3.8.4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Seni (IPTEKS)

Penelitian yang mencakup aspek hulu (*indigenous knowledge*, dan bahan baku), standarisasi, formulasi dan pengembangan produk, dan aspek hilir (uji pra-klinik dan uji klinik, implementasi Jamu dalam layanan kesehatan masyarakat di rumah sakit dan Puskesmas).

3.8.5. Pengembangan Industri Jamu

Pengembangan produk yang terkait dengan mutu, regulasi dan pemasarannya di tingkat nasional, regional dan global

3.8.6. Promosi peningkatan & perluasan pasar

- a. Diseminasi pengetahuan, manfaat Jamu, produk di tingkat nasional, regional dan global
- b. Penguatan modal melalui pola kemitraan
- c. Pemenuhan regulasi, mutu produk Jamu untuk ekspor
- d. Penguatan *networking stakeholder* Jamu di tingkat lokal, nasional dan regional
- e. Membangun *edu-ecotourism* Jamu

3.8.7. Peningkatan pemanfaatan dan integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan

- a. Melaksanakan dan meningkatkan program saintifikasi Jamu untuk meningkatkan jenis Jamu yang tersaintifikasi dan cakupan wilayah pengguna Jamu
- b. Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang melayani Jamu dengan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu
- c. Sertifikasi dan peningkatan kemampuan pelayan Batra dalam pelayanan kesehatan formal
- d. Meningkatkan SDM yang mempunyai kemampuan implementasi Jamu dalam pelayanan kesehatan yang kuat.

3.8.8. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan

- a. Membangun kelembagaan permodalan yang kuat dan pola kemitraan dari hulu ke hilir yang kuat dan berkelanjutan
- b. Membangun/menyusun skema-skema pendanaan yang mendukung perkembangan UKM dan industry Jamu dari hulu ke hilir

3.8.9. Pengembangan sistem informasi dan perlindungan HKI Jamu

- a. Membangun sistem informasi Jamu yang dapat diakses masyarakat
- b. Membangun dokumentasi Jamu berdasarkan keunggulan daerah/wilayah



3.8.10. Pemantapan dan pelestarian budaya budaya pemanfaatan Jamu

Pemantapan regulasi terkait perlindungan HKI, *indigenous knowledge*, paten, *state of the art* Jamu dan regim HKI lainnya.



IV

ROADMAP PENGEMBANGAN JAMU 2011–2025

NO	PROGRAM	SASARAN		
		2011-2015	2015-2020	2020-2025
1.	Pengembangan bahan baku terstandar dan bermutu	<ul style="list-style-type: none">• Diperolehnya peta potensi sumber plasma nutfah dan kawasan/sentra produksi tanaman obat• Dikuasainya teknologi budi daya tanaman obat potensial (pembibitan, budi daya, paskapanen) sesuai dengan kaidah GAP yang ramah lingkungan• Tersusunnya standar acuan mutu simplisia dan ekstrak tanaman obat• Diperolehnya pola budidaya tanaman obat yang produk tif dan layak secara ekonomi• Terbangunnya lembaga penjamin bahan baku yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Terbangunnya kawasan/ sentra produksi tanaman obat potensial pada skala komersial• Dikuasainya teknologi modern dalam perbanyaktan tanaman untuk budidaya tanaman obat potensial.• Dikuasainya beberapa teknologi pendukung budidaya tanaman obat yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Berkembangnya agroindustri tanaman obat• Terwujudnya tanaman obat sebagai komoditi ekonomi unggulan

NO	PROGRAM	SASARAN		
		2011-2015	2015-2020	2020-2025
2.	Pengembangan industri Jamu	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya regulasi dan pola pembinaan industri Jamu yang tepat dan komprehensif • Tersedianya infrastruktur terkait industri Jamu yang baik dan efisien berdasarkan sistem <i>cluster</i> • Tersedianya lembaga permodalan dengan skema yang sesuai untuk industri Jamu • Tersedianya teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas produk dan produktivitas industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penguatan struktur industri Jamu, baik industri kecil mengengah maupun besar. • Adanya penguatan pasar lokal, regional dan global • Tersedianya regulasi dan strategi perlindungan yang tepat untuk menghadapi kesepakatan pasar bebas dan harmonisasi ASEAN • Terbangunnya sistem inovasi industri Jamu 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya Industri Jamu nasional yang berdaya saing • Berkembangnya industri Jamu secara merata di wilayah Indonesia
3.	Fasilitasi pembiayaan dan permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya kelembagaan permodalan (keuangan) yang kuat dan fokus pada industrialisasi Jamu • Tersusunnya skema pendanaan yang menarik (<i>attractive</i>) untuk mendorong industri Jamu (hulu-hilir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalinnya kemitraan yang intensif antara petani, industri kecil, menengah dan besar dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan tanaman obat dan Jamu 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya sistem pembiayaan dan pola kemitraan yang berkelanjutan dalam mendorong terwujudnya investasi dan berkembangnya industri Jamu yang berdaya saing

NO	PROGRAM	SASARAN		
		2011-2015	2015-2020	2020-2025
		<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya konsep kemitraan antara petani dan industri dengan lembaga permodalan (keuangan) 		
4.	Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya penguatan kelembagaan IPTEKS Jamu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas litbang Tercapainya penguatan sumber daya IPTEKS Jamu (peningkatan jumlah, pendidikan dan kompetensi peneliti, peningkatan sarana dan prasarana penelitian, peningkatan kegiatan penelitian) Tercapainya penguatan jaringan IPTEKS Jamu melalui jalinan kerjasama antara penyedia dengan pengguna teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jejaring IPTEKS Jamu melalui kerjasama riset nasional dan internasional Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang Jamu untuk menyediakan teknologi yang dibutuhkan industri (hulu-hilir) Terbangunnya sistem inovasi teknologi Jamu dengan mengedepankan peran kemitraan antara lembaga litbang dan industri pengguna teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemanfaatan IPTEKS dalam industri Jamu untuk peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk dan peningkatan produktivitas dan efisiensi industri yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap IPTEKS dalam negeri.

NO	PROGRAM	SASARAN		
		2011-2015	2015-2020	2020-2025
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuh dan berkembangnya kedulian dan pemahaman tentang Jamu di masyarakat Terbangunnya sistem pendidikan Jamu yang komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan Jamu secara berkesinambungan dan komprehensif Meningkatnya kualitas SDM Jamu dengan penguasaan iptek 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat yang memahami dan bangga dengan Jamu secara berkesinambungan SDM Jamu yang kompeten, berdaya saing dan mandiri
6.	Penguatan kelembagaan dan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya pola koordinasi yang efektif antar lembaga yang kompeten dan mempunyai kewenangan dalam pengembangan Jamu Terbangunnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Jamu Diperolehnya data, peta dan rekomendasi kajian regulasi /kebijakan yang terkait dengan pengembangan Jamu Dikeluarkan dan diberlakukannya regulasi/kebijakan yang atraktif untuk mendorong pengembangan Jamu pada semua sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran, fungsi dan penajaman program pada setiap lembaga terkait sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya Evaluasi regulasi yang berlaku untuk mendorong pengembangan Jamu pada semua sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya sistem kelembagaan Jamu yang tertata, kuat dan koordinatif pada semua sektor (bahan baku, produksi, industri, pengawasan, perdagangan, iptek, investasi, pendidikan) dengan dukungan regulasi yang tepat

NO	PROGRAM	SASARAN		
		2011-2015	2015-2020	2020-2025
7.	Promosi, peningkatan dan perluasan pasar global	<ul style="list-style-type: none"> • Jamu merupakan payung bagi semua produk berbasis bahan alam • Terwujudnya penguatan peran dan koordinasi antara lembaga yang berwenang dan kompeten dalam mendorong promosi dan perdagangan (ekspor dan impor) Jamu • Tersusunnya program regular yang sistematis untuk mengadakan promosi Jamu baik di dalam negeri maupun di luar negeri • Terbangunnya kepedulian industri untuk meningkatkan kualitas dan melakukan inovasi produk agar bisa diterima pasar global • Mendaftarkan Jamu sebagai <i>World Heritage</i> tak benda • Penggunaan Jamu sebagai minuman kesehatan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Berjalanya agenda promosi Jamu secara sistematis dalam berbagai bentuk dan media • Terbangunnya <i>brand</i> Jamu Indonesia secara internasional • Meningkatnya pasar produk Jamu baik lokal maupun global 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penguatan <i>brand</i> Jamu Indonesia secara Internasional • Terwujudnya perluasan dan peningkatan pasar produk Jamu yang signifikan pada skala internasional

NO	PROGRAM	SASARAN		
		2011-2015	2015-2020	2020-2025
8.	Peningkatan pemanfaatan dan integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya regulasi dan konsep pemanfaatan serta integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan • Tersedianya SDM (praktisi media Jamu) yang cukup dengan kompetensi dan komitmen yang tinggi • Terlaksananya kooordinasi antar lembaga terkait yang intensif • Terjaminnya ketersediaan produk Jamu berkualitas yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan • Terlaksananya saintifikasi Jamu secara cepat untuk mendapatkan produk Jamu berkhasiat dan berkualitas yang siap diterapkan dalam integrasi Jamu 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya saintifikasi Jamu secara berkelanjutan pada skala yang lebih luas dan jumlah produk Jamu yang lebih banyak. • Terselenggaranya sosialisasi penerapan integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas secara efektif dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasinya Jamu dalam pelayanan kesehatan secara nasional

NO	PROGRAM	SASARAN		
		2011-2015	2015-2020	2020-2025
9.	Pengembangan sistem informasi dan perlindungan HKI Jamu	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya konsep sistem informasi Jamu terpadu dengan dukungan kelembagaan dan regulasi yang kuat • Terbangunnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI pada semua sektor Jamu • Terbangunnya sentra HKI Jamu sebagai sarana komunikasi, informasi dan konsultasi aplikasi HKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem informasi Jamu secara terpadu (hulu-hilir) yang akurat • Meningkatnya perlindungan dan aplikasi HKI Jamu (hak cipta maupun hak kekayaan industri) dari lembaga riset dan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem informasi Jamu terpadu secara berkelanjutan. • Terbangunnya industri Jamu yang berdaya saing (hulu-hilir) sebagai wujud peran sistem informasi yang akurat dan sistem perlindungan HKI yang kokoh.
10.	Pemantapan dan pelestarian budaya pemanfaatan Jamu	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya konsep budaya dan pelestarian Jamu dengan dukungan kelembagaan dan regulasi yang kuat • Terbangunnya kesadaran dan kedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya Jamu 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya upaya pelestarian budaya Jamu secara sistematis dan terprogram • Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya Jamu 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya Jamu sebagai warisan budaya secara berkesinambungan • Terbangunnya budaya menggunakan Jamu pada kehidupan masyarakat secara berkesinambungan





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI

MATRIKS *ROADMAP* PENGEMBANGAN JAMU INDONESIA





NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
I. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
1.	Pengayaan Penggetahuan Praktisi Jamu	1. Peningkatan Pengetahuan tentang jamu untuk Tenaga Pembina/ Pengawas Bidang Kesehatan	a. 100 Orang trainer terlatih untuk petugas Balai POM dan Dinkes	a. 1000 trainer terlatih untuk petugas Balai POM dan Dinkes di Kota- Kota Besar Sumatera – Jawa - Bali	a. 1000 trainer terlatih untuk petugas Balai POM dan Dinkes ke pelosok Indonesia	BPOM PPSDM	BPOM PPSDM
			b. Setiap tahun terlatih 20 orang tenaga Pembina/ Pengawas	b. 200 tenaga Pembina/ Pengawas bidang kesehatan di Kota Kota Besar Sumatera – Jawa – Bali	b. 200 tenaga Pembina/ Pengawas bidang kesehatan di seluruh Indonesia	BPOM PPSDM	BPOM PPSDM
2.	Peningkatan Pengetahuan Praktisi Penyedia Bahan Baku Jamu	a. 60 Petani dan Pengolah Primer sudah terlatih menyediakan bahan baku jamu	a. Petani dan Pengolah Primer sudah terlatih menyediakan 5 tanaman obat yang menerapkan GAP/SOP GHP, GMP dalam agribisnisnya	a. Seluruh Petani dan Pengolah Primer sudah terlatih menyediakan bahan baku jamu	Kementerian Peternakan Ditjen Hortikultura dan Ditjen PPHP, Litbang Pertanian, PT	Kemenkes, BPOM, PT	Kemenkes, BPOM, IPB
		b. Sudah ditempatkan	b. Fasilitasi penyediaan	b. Tersedianya bahan baku			

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)				
			petugas Supervisor industri jamu di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota	bahan baku sesuai dengan tingkat kebutuhan industri di berbagai wilayah	sesuai dengan tingkat kebutuhan industri di berbagai wilayah		
3.	Peningkatan pengetahuan tentang jamu untuk praktisi pelayanan kesehatan tradisional	a. 400 Dokter sudah memiliki sertifikat Dokter Jamu dalam rangka saintifikasi Jamu b.Apoteker, Asisten Apoteker, dan Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti Diklat Saintifikasi Jamu	a. Teredianya dokter yang telah mengikuti Saintifikasi Jamu di Kabupaten/ Kota b. Teredianya Apoteker, Asisten Apoteker, dan Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti Diklat Saintifikasi Jamu di Kabupaten/ Kota	a. Teredianya dokter yang telah mengikuti Saintifikasi Jamu di seluruh Puskesmas b. Teredianya Apoteker, Asisten Apoteker, dan Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti Diklat Saintifikasi Jamu di Kabupaten/ Kota	Kemenkes, Kemdiknas, PB IDI	BPOM PPSDM PB IDI	
	c. 150 Pelatih dan Pengujji	c. Pelatih dan Pengujji	c. Pelatih dan Pengujji	c. Pelatih dan Pengujji	Kemenkes Kemdiknas		



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Sertifikasi UK Praktisi jamu (battra Ramuan OTAI) di Seluruh Propinsi.	Sertifikasi UK Praktisi jamu (battra Ramuan OTAI) di Seluruh Propinsi.	Sertifikasi UK Praktisi jamu (battra Ramuan OTAI) di Seluruh Kabupaten/ Kota	Sertifikasi UK Praktisi jamu (battra Ramuan OTAI) yang sudah Bersertifikat UK di Propinsi DPD ASPETRI	ASPETRI (LSK BATTRA RAMUAN)	
		d. 3000 Praktisi jamu (battra Ramuan OT Asli Indonesia) sudah Bersertifikat Uji Kompetensi tk Pratama, Madya, dan tk Utama di 24 Propinsi DPD ASPETRI	d. Praktisi jamu (Battra Ramuan OTAI) yang sudah Bersertifikat UK di Propinsi DPD ASPETRI	d. Praktisi jamu (Battra Ramuan OTAI) yang sudah Bersertifikat UK yang sudah di upgrading di Propinsi DPD ASPETRI	Kemenkes Kemdiknas	Praktisi jamu (Battra Ramuan OTAI) Bersertifikat UK yang sudah di upgrading di Propinsi DPD ASPETRI	ASPETRI (LSK BATTRA RAMUAN)
4.	Peningkatan pengetahuan masyarakat pengguna jamu	a. 5000 Kader sudah terlatih penyuluhan – motivator (Pen-mot) pemanfaatan Jamu di Desa Binaan Toga di 250 Kab./Kota (500 Puskesmas)	a. Teredia Kader sudah terlatih penyuluhan – motivator (Pen-mot) pemanfaatan Jamu di Desa Binaan Toga di Seluruh Kab./Kota	a.			

NO.	STRATEGI/KEBUJUAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	PANJANG (2021-2025)			
		b. 4000 Tenaga Terlatih Pen-mot pemanfaatan Jamu (dan TOGA) kelompok UKBM di di 250 Kab/Kota (500 Pusk)	b. Tersedia Tenaga Terlatih Pen-mot pemanfaatan Jamu (dan TOGA) kelompok UKBM di di Seluruh Kab/Kota	b.			
		c. Tersedia Tenaga Terlatih Pen-mot pemanfaatan Jamu (dan TOGA) di Organisasi Masyarakat spt : Kelompok PKK, KOWANI, dll di Seluruh Propinsi	c. Tersedia Tenaga Terlatih Pen-mot pemanfaatan Jamu (dan TOGA) di Organisasi Masyarakat spt : Kelompok PKK, KOWANI, dll di Seluruh Kabupaten/ Kota	c.			
2.	Pengembangan Pendidikan Formal Praktisi Jamu	1. Pendidikan Dokter Jamu	Disyahkannya/ diaukunya sistem Pendidikan Kedokteran Berbasis Jamu	Dilaksanakan Pendidikan Kedokteran Berbasis Jamu pada 3 Institusi Pendidikan	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pendidikan Kedokteran Berbasis Jamu yang sudah ada dan	Kemendiknas, Kemenkes	Perguruan Tinggi, Sekolah Kedinasan



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	PENDEK (-2014)	SASARAN MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					Pengembangan -nya pada 12 Perguruan Tinggi lain		
2.	Pendidikan Praktisi Formulasi Jamu	Disyahkannya/ diakuiinya sistem Pendidikan Farmasi Berbasis Jamu	Dilaksanakan Pendidikan Ahli Farmasi Berbasis Jamu pada 3 Lembaga Pendidikan	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pendidikan Farmasi berbasis jamu yang sudah ada dan pengembangannya pada 12 Perguruan Tinggi lain	Kemendiknas, Kemenkes	Perguruan Tinggi, Sekolah Kedinasan	
3.	Pendidikan Praktisi Penyedia Bahan Baku Obat Jamu	Disyahkannya/ diakuiinya sistem Pendidikan Budidaya Bahan Baku Jamu	Dilaksanakan Pendidikan Budidaya Bahan Baku Jamu pada 3 Lembaga Pendidikan	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pendidikan Budidaya Bahan Baku jamu yang sudah ada dan pengembangannya pada 12 Perguruan Tinggi lain	Kemendiknas, Kementerian Kementerian	Perguruan Tinggi, Sekolah Kedinasan	

NO.	STRATEGI/KEBUJUAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)				
II. Penguatkan kelembagaan dan regulasi							
1.	Sinkronisasi peran lembaga	1. Koordinasi lintas lembaga terkait	a. Terbangunnya kesamaan cara pandang, visi dan misi pengembangan jamu dalam perumusan program lembaga sesuai dengan kewenangan dan tupoksi	a. Implementasi visi dan misi pengembangan jamu dalam perumusan program lembaga sesuai dengan kewenangan dan tupoksi	a. Terlaksananya program pengembangan jamu secara sistematis dan berkesinambungan pada setiap lembaga terkait sebagai bentuk kuatnya dukungan kelembagaan dalam pengembangan jamu	Kemenko perekonomian dan Kemenko Kesra	Seluruh lembaga terkait
			b. Terbangunnya koordinasi antar lembaga yang efektif dengan leading sektor yang aktif	b. Peningkatan koordinasi lintas lembaga			Seluruh lembaga terkait
2.	Penyusunan Roadmap Pengembangan Jamu Indonesia	Tersedianya road map pengembangan jamu Indonesia	Monitoring dan Evaluasi implementasi Roadmap pengembangan Jamu Indonesia	Pengembangan roadmap	Kemenko Ekonomi dan Kemenko Kesra	BPM, Kementerian, Kemenhut, Kemenkes, Perguruhan Tinggi, BPPT, LIPI, Kementerian, Kemenko L-UKM, GP Jamu, Pemerintah Daerah	



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		3. Penyusunan Rencana kerja, monitoring dan evaluasi, dan jadwal/timeline sesuai target yang akan dicapai	Tersedianya rencana kerja, monitoring dan evaluasi untuk sinkronisasi pengembangan jamu nasional	Tersedianya rencana kerja, monitoring dan evaluasi untuk sinkronisasi pengembangan jamu nasional	Kemenko-ekonomi, Kemenko Kesra	
2.	Penguatan Kelembagaan	1. Pembentukan Forum komunikasi dan kerjasama dengan sektor terkait, Pemda dan profesional kesehatan (Forum Jamu Nasional/Badan Jamu Nasional)	Terbentuknya forum komunikasi kegiatan lintas sektor sektor atau Komite Daerah Jamu Sumatera – Jawa – Bali	Terbentuknya forum komunikasi kegiatan lintas sektor atau Komite Daerah Jamu seluruh pelosok indonesia	Kemenko perekonomian dan Kemenko Kesra	Kemenkes, Kementerian, Kemenhut, BPOM Perguruan Tinggi, BPPT, LIPI, Kemendag, Kemenin, Kemenkol-UKM, GP Jamu, Pemerintah Daerah
3.	Fasilitasi Kelembagaan Bagian Hulu	1. Fasilitasi pembentukan dan pemantapan konsorsium, Industri bahan baku jamu 2. Fasilitasi pembentukan dan penguatan	Pembentukan dan pemantapan konsorsium bahan baku Terbentuknya kelembagaan usaha	Pemantapan konsorsium bahan baku Penguatan kelembagaan usaha	Pemantapan konsorsium bahan baku Penguatan kelembagaan usaha	Kementan (BPSDM, Ditjen Hortikultura, Ditjen PPnBP, Balitro) Kementan (BPSDM, Ditjen Hortikultura, Tinggi/IPB, BPPT, LIPI)

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		kelembagaan usaha (Kelompok tani/Gapoktan, Asosiasi, Koperasi) dan Kewirausahaan			Ditjen PPHP, Balitetro	
		3. Fasilitasi pengukuhan kelembagaan usaha yang memiliki Badan Hukum	Pengukuhan kelembagaan usaha yang sudah memiliki Badan Hukum	Penguatan kelembagaan usaha dan jaringan kewirausahaan/haan/ pelaku industri jamu yang sudah memiliki Badan Hukum	Kementan (BPSDM, Ditjen Hortikultura, Ditjen PPHP, Balitetro)	Perguruan Tinggi
		4. Penataan rantai Paso0.56 cm 5. k (supply chain management)	Terbangunnya peta rantai pasok untuk komoditas tanaman jamu utama	Terkendalinya rantai pasok komoditas tanaman obat utama	Kementan (BPSDM, Ditjen Hortikultura, Ditjen PPHP, Balitetro)	Kemenkes, BPOM, Perguruan Tinggi/PPB
4.	Penguatan lembaga permodalan, promosi dan perdagangan	Melakukan komunikasi dan melibatkan secara langsung lembaga permodalan dan keuangan dalam upaya mendorong	a. Terbangunnya kepedulian lembaga permodalan pada upaya mendorong pertumbuhan industri jamu	a. Tersusunnya beberapa program dan skema pendanaan/ permodalan yang di-keluarkan oleh lembaga	a. Meningkatnya jumlah dan daya saing industri jamu sebagai akibat kuatnya permodalan yang disalurkan oleh	Kemenko Perekonomian
						Perbankan, Kadin, BKPM, Kemenkop GP Jamu, Asosiasi perdangan, Kelompok tani



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		pengembangan industri jamu	permодалан	lembaga keuangan/ permодалан		
		b. Tersusunnya konsep kemitraan antara lembaga permodalan dengan pelaku usaha di bidang jamu	b. Meningkatnya jumlah modal yang disalurkan lembaga permodalan pada unit usaha jamu (hulu-hilir)	b. Unit usaha jamu tidak ada kendala tentang permodalan	Kemenko Perbankan, Kadin, BKPM, Kemenkop Perekonomian	Perbankan, Kadin, BKPM, Kemenkop GP Jamu, Asosiasi pedagang, Kelompok tani/ Gapoktan
5.	Sinkronisasi regulasi	1. Pemetaan dan evaluasi regulasi/ kebijakan jamu	a. Diperolehnya peta regulasi yang ada terkait pengembangan jamu, hasil evakuasi dan rekomendasi kebijakan	a. Penguatan implementasi kebijakan/ regulasi pada setiap lembaga terkait sesuai dengan kewenangan dan tupoksi	a. Tersediannya regulasi pengembangan jamu yang rasional dan efektif dalam implementasi pada tataran operasional	Lembaga Leading sektor Seluruh lembaga terkait
		b. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan Tradisional Kebijakan Nasional	b. Dikeluarkan beberapa regulasi baru yang sangat diperlukan untuk mendorong pengembangan	b. Regulasi pengembangan jamu telah berjalan		

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	PANJANG (2021-2025)			
				n jamu pada semua sektor			
2.	Penyusunan Regulasi Pasar Jamu	a. Peraturan Pemerintah guna meningkatkan insentif pengembangan agribisnis Jamu	a. Rencana Undang-undang guna meningkatkan insentif pengembangan agribisnis Jamu	a. Undang-undang guna meningkatkan insentif pengembangan agribisnis Jamu	Kemenko perekonomian	BPOM,, Kemendag, Kemenin, Kemenhub, Kemenkeu, Perguruan Tinggi	
		b. Peraturan Pemerintah mengenai Bea Eksport-Impor komoditas jamu yang kondusif	b. Rencana Undang-undang mengenai Bea Eksport-Impor komoditas jamu yang kondusif	b. Undang-undang mengenai Bea Eksport-Impor komoditas jamu yang kondusif	Kemenkeu	Kemenkeu Setneg DPR	
		c. Peraturan Pemerintah mengenai Bea Eksport-Impor komoditas jamu yang kondusif	c.	c.	Kemenkeu		
		d. Peraturan Pemerintah mengenai insentif pajak bagi industri jamu	d.	d.	Kemenkeu		



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	PENDEK (-2014)	SASARAN MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		<p>3. Penyusunan Peraturan Pemerintah yang mendorong peningkatan penggunaan jamu pada sarana kesehatan resmi</p>	<p>a. Tersedianya 1 (satu) Peraturan Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan jamu pada sarana kesehatan resmi</p> <p>b. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang persyaratan bahan baku</p> <p>c. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang produksi dan distribusi</p> <p>d. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang iklan</p> <p>e. Tersedianya 1 (satu)</p>	<p>a. Tersosialisasi-nya Peraturan Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan jamu pada sarana kesehatan resmi</p> <p>b. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang persyaratan bahan baku</p> <p>c. Tersosialisasi-nya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang produksi dan distribusi</p> <p>d. Tersosialisasi-nya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang iklan</p> <p>e. Tersosialisasi-nya 1 (satu)</p>	<p>a. Tersedianya 1 (satu) Peraturan Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan jamu pada sarana kesehatan resmi</p> <p>b. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang persyaratan bahan baku</p> <p>c. Revisi peraturan/ pedoman tentang produksi dan distribusi</p> <p>d. Revisi peraturan/ pedoman tentang iklan</p> <p>e. Tersedianya 1 (satu)</p>	<p>Kemenkes, BPOM</p> <p>Kemenkeu, Kemendag, Kemenko Ekonomi Perguruan Tinggi</p> <p>BPOM</p> <p>Peraturan Tinggi dan Kementerian</p> <p>BPOM</p> <p>Kemenkes</p> <p>Kemendag, Kemen industri</p> <p>Kemenkes</p>	

NO.	STRATEGI/KEBUJUAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		peraturan/ pedoman tentang tata cara pendaftaran	peraturan/ pedoman tentang tata cara pendaftaran	peraturan/ pedoman tentang tata cara pendaftaran	f. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang Jamu masuk dalam sistem pembayaran kesehatan (Askes, dll)	f. Tersosialisasi- nya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang Jamu masuk dalam sistem pembayaran kesehatan (Askes, dll)
		f. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang Jamu masuk dalam sistem pembayaran kesehatan (Askes, dll)	f. Tersedianya 1 (satu) peraturan/ pedoman tentang Jamu masuk dalam sistem pembayaran kesehatan (Askes, dll)	Kemenkes	BPOM, Perguruan Tinggi	
4.	Penyusunan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan dan Pemanfaatan OAI	Terbitnya Undang- undang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	Tersosialisasi Undang- undang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	Evaluasi dan Revisi Undang- undang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	Kemenkes, BPOM	Perguruan Tinggi
5.	Stratifikasi produsen jamu di seluruh Indonesia	Tersedianya peraturan/ pedoman tentang strifikasi produsen jamu di seluruh Indonesia	Sosialisasi dan Bimbingan da- lam rangka strifikasi produsen jamu di seluruh Indonesia	Implementasi peraturan strifikasi produsen jamu di seluruh Indonesia	Kemenkes, BPOM	Perguruan Tinggi



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)				
6.	Perlindungan medik, etik, legal (medikoetikolegal)	Pembentukan Dewan Etik Jamu	Indonesia	Terbentuknya sistem rujukan RS pelayanan Jamu	Implementasi sistem rujukan rumah sakit pelayanan jamu	Evaluasi dan monitoring sistem rujukan rumah sakit pelayanan jamu	Kemenkes	BPOM, Kementan, Perguruan Tinggi
III. Pengembangan bahan baku terstandar dan bermutu								
1.	Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan mutu	1. Inventarisasi dan Penapisan Kebutuhan Bahan Baku Nasional	a. Inventarisasi data kebutuhan bahan baku di industri	a. Lanjutan Evaluasi keter- sediaan dan kebutuhan bahan baku Nasional	a. Lanjutan Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan bahan baku Nasional	Badan POM	GP Jamu, Perguruan Tinggi	
			b. Inventarisasi ketersediaan bahan baku jamu	b. Tersedianya bahan baku jamu di sentra produksi	b. Tersedianya bahan baku jamu di sentra produksi	Kementan, Kemenhut	BPOM, Perguruan Tinggi	
			c. Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan bahan baku Nasional terpenuhi 60%	c. Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan bahan baku Nasional terpenuhi 75%	c. Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan bahan baku Nasional terpenuhi 95%	Badan POM	Kementan, Perguruan Tinggi	
		2. Penyiapan GAP/SOP,GHP, GMP bahan baku	Tersedianya GAP/SOP, GHP, GMP untuk komoditas tanaman obat	Tersedianya GAP/SOP, GHP, GMP untuk komoditas tanaman obat	Tersedianya GAP/SOP, GHP, GMP untuk komoditas tanaman obat	Kementan (BPSDM, Ditjen Hortikultura, Ditjen PPHP, Badan Litbang Pertanian),	PT/IPB, GP Jamu, Industri, BPOM, Kemendesa	

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)				
		3. Penyediaan Benih Bermutu	a. Penyiapan benih sumber dan perbaikan benih	a. Tersediannya benih sumber, uji multilokasi, dan perbaikan benih	a. Tersediannya benih sumber, uji multilokasi, dan perbaikan benih	Kementerian (Ditjen Hortikultura, Badan Litbang Pertanian)	PT/IPB, GP Jamu, Industri
			b. Penumbuhan Penangkar Benih dengan jenis tanaman	b. Penumbuhan Penangkar Benih dengan jenis tanaman	b. Penumbuhan Penangkar Benih dengan jenis tanaman	Kementerian (Ditjen Hortikultura, Badan Litbang Pertanian)	PT/IPB, BPPT, LIPI
			c. Penyusunan dan penerbitan pedoman teknologi budidaya tanaman obat dan penanganan pasca panen sesuai GAP, GHP, GMP	c. Tersediannya pedoman teknologi budidaya tanaman obat dan penanganan pasca panen sesuai GAP, GHP, GMP	c. Tersediannya pedoman teknologi budidaya tanaman obat dan penanganan pasca panen sesuai GAP, GHP, GMP	Kementerian (Ditjen Hortikultura, Badan Litbang Pertanian)	BPOM, PT/IPB, BPPT, LIPI
4.	Pengembangan Sentra Produksi	a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang potensi untuk pengembangan tanaman obat dan pemanfaatan	a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang potensi untuk pengembangan tanaman obat dan pemanfaatan	a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang potensi untuk pengembangan tanaman obat dan pemanfaatan	Kementerian (Ditjen Hortikultura)	PT/IPB	

NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			lahan tidur/ lahan pekarangan	lahan tidur/lahan pekarangan	lahan tidur/lahan pekarangan		
		b. Sosialisasi, Pendampingan, dan Penerapan SOP Budidaya Tanaman Obat, dan sertifikasi Bahan Baku	b. Sosialisasi, Pendamping- an, dan Penerapan SOP Budidaya Tanaman Obat, dan sertifikasi Bahan Baku	b. Sosialisasi, Pendamping- an, dan Penerapan SOP Budidaya Tanaman Obat, dan sertifikasi Bahan Baku	b. Sosialisasi, Pendamping- an, dan Penerapan SOP Budidaya Tanaman Obat, dan sertifikasi Bahan Baku	Kementan (Ditjen Hortikultura)	Pemda, GP Jamu, Perguruhan Tinggi
		c. Penyuluhan Lapangan Pengamat Hama di daerah	c. Penyuluhan Lapangan Pengamat Hama di daerah	c. Penyuluhan Lapangan Pengamat Hama di daerah	c. Penyuluhan Lapangan Pengamat Hama di daerah	Kementan (Ditjen Hortikultura)	
5.	Pemanfaatan Sentra Produksi	a. Penyusunan dan Sosialisasi Penerapan SOP Budidaya dan Penanganan Pascapanen Bahan Baku	a. Penyusunan dan Sosialisasi Penerapan SOP Budidaya dan Penanganan Pascapanen Bahan Baku	a. Penyusunan dan Sosialisasi Penerapan SOP Budidaya dan Penanganan Pascapanen Bahan Baku	a. Penyusunan dan Sosialisasi Penerapan SOP Budidaya dan Penanganan Pascapanen Bahan Baku	Kementan	Perguruhan Tinggi
		b. Fasilitasi Sarana Pasca Panen dan Pengolahan				Kementan (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)	Pergruruhan Tinggi
		c. Kelembagaan Produksi dan Pemasaran				Kementan (Ditjen Pengolahan dan	Pergruruhan Tinggi

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	
					Pemasaran Hasil)	
6.	Penetapan Mutu Bahan Baku	a. Tersusunnya 165 Standarisasi simplisia b. Tersusunnya 165 Standarisasi Ekstrak c. Pengawasan Mutu Produk bahan baku	Tersusunnya 250 Standarisasi simplisia	Tersusunnya 375 Standarisasi simplisia	BPOM	Perguruan Tinggi
7.	Pengembangan Sistem Koordinasi Penyediaan Bahan Baku Jamu	Fasilitasi Koordinasi	Tersusunnya 250 Standarisasi Ekstrak	Tersusunnya 375 Standarisasi Ekstrak	Industri BPOM	Perguruan Tinggi
2.	Pedestrian Plasma Nutfah dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Hutan Lestari	1. Pemanfaatan Tumbuhan Obat Hutan Berkualitas secara Berkesinambungan 2. Pengembangan Taman Koleksi	a. Pengayaan Hutan dengan Tumbuhan Obat b. Penyelesaian GCP Hasil Hutan untuk Bahan Baku Obat a. Pembangunan Pusat Koleksi Tumbuhan Obat b. Pengembangan		Kementerian Kemenhut	Kemenkes

NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		TOGA			Kemenkes Kemenhut	Tinggi Perguruan Tinggi
		c. Konservasi Plasma Nutfah in-situ			Kementan, Pemda	Perguruan Tinggi
		d. Konservasi Plasma Nutfah eks-situ				
IV. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTES)						
1.	Penelitian Dasar Untuk Eksplorasi Sumber daya Hayati	1. Botanical Screening (Penelitian Etnomedisin/ Etnofarmakologi. (Survei etnomedisin)	Tersedianya 150 data etnomedisin dan data sumberdaya yang potensial diteiliti lebih lanjut	Terseedianya 250 data etnomedisin dan data sumberdaya yang potensial diteliti lebih lanjut	Ristek, Kemendiknas, LIPI	B2P2TO2T, BALITTRO, LIPI, Ditjen Hortikultura, Perguruan Tinggi, Industri, Kehutanan, Kelautan, BPOM, Kemenkes
2.	Penelitian Pengembangan Pemanfaatan Sumber daya	Meningkatnya pengetahuan dalam pemanfaatan tanaman untuk obat atau kesehatan			Ristek, Kemendiknas, LIPI	
3.	Review status potensi dan	Tersedianya status potensi			Kemenhut, Kemen KP,	BPOM, Kemenkes,

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	PANJANG (2021-2025)			
		sebaran jenis-jenis tumbuhan hutan dan laut yang berkhasiat obat	dan sebaran jenis-jenis tumbuhan hutan dan laut yang berkhasiat obat			Kementan	Perguruan Tinggi
4.	Penelitian sebaran dan persyaratan tumbuh jenis-jenis tumbuhan hutan dan laut yang berkhasiat obat	Tersedianya hasil penelitian tentang persebaran dan persyaratan tumbuh jenis-jenis tumbuhan hutan dan laut yang berkhasiat obat			LPI, Kemenhut, Kementan, Kemen KP	Perguruan Tinggi	
5.	Penelitian kandungan bioaktif (fitofarmaka) dari jenis-jenis tumbuhan hutan dan laut yang berkhasiat obat	Tersedianya data penelitian kandungan bioaktif (fitofarmaka) dari jenis-jenis tumbuhan hutan dan laut yang berkhasiat obat			Kemenhut, Kementan, Kemen KP, Lembaga Penelitian	Perguruan Tinggi	
6.	Penyusunan Data Potensi Tumbuhan Obat, Manfaat, dan Peluang	meningkatnya paket informasi, potensi, dan sebaran jenis-jenis			Kemenhut	Perguruan Tinggi	

NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		Pengembangan-nya	tumbuhan hutan yang berkhasiat obat			
2.	Penelitian untuk Menunjang Penerapan Teknologi di Bagian Hulu (Penyiapan Bahan Baku)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian/kajian/pemetaan kesesuaian tanaman obat 2. Riset Budidaya dan Pembibitan 3. Riset Pasca panen dan pengolahan 4. Riset Bioteknologi Tumbuhan 5. <i>Plant derived drugs</i> 	<p>..... Tumbuhan obat telah diketahui karakteristik lingkungan tumbuhnya per tahun</p> <p>Tersedianya SOP teknologi budidaya dan penyediaan bibit unggul</p> <p>Tersedianya SOP teknologi pasca panen dan pengolahan</p> <p>a. Tersedianya Bibit unggul spesifik</p> <p>b. Tersedianya informasi produksi senyawa metabolit</p> <p>Informasi tentang</p>	<p>Kementerian, Kemenhut</p> <p>Kementerian</p> <p>Kementerian</p> <p>Kementerian, Kemenhut</p> <p>Kemenkes</p>	<p>Perguruan Tinggi</p> <p>PT/IPB, B2P2TO2T/Kemenkes</p> <p>PT/IPB, BPPT, LIPI</p> <p>Lembaga Penelitian, PT</p> <p>Lembaga Penelitian, PT, BPPT, LIPI</p> <p>PT, BPPT, LIPI, Litbang</p>	

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	
			potensi bahan baku obat dari tumbuhan			Terkait
3.	Penelitian Mutu, Keamanan dan Khasiat tanaman obat unggulan (skala prioritas)	1. Penelitian mutu tanaman obat/produk	Tersedianya 150 data mutu tanaman obat/produk	Tersedianya 250 data mutu tanaman obat/produk	Tersedianya 375 data mutu tanaman obat/produk	Kemenkes, BPOM, Lembaga Penelitian
		2. Penelitian Keamanan Tanaman Obat/Produk	Tersedianya 150 profil keamanan tanaman obat/produk	Tersedianya 250 profil keamanan tanaman obat/produk	Tersedianya 375 profil keamanan tanaman obat/produk	Kemenkes, BPOM
		3. Uji farmakologi Tanaman Obat/Produk	Data farmakologi tanaman obat/produk			Kemenkes
		4. Sosialisasi hasil penelitian tanaman unggulan nasional	Termanfaatkan nya 150 hasil penelitian tanaman unggulan	Termanfaatkan -nya 250 hasil penelitian tanaman unggulan	Termanfaatkan -nya 375 hasil penelitian tanaman unggulan	BPOM, Lembaga Penelitian, Kemenkes
		5. Pengujian dalam rangka standarisasi dan pengawasan produk	Tersedianya 150 hasil pengujian produk	Tersedianya 250 hasil pengujian produk	Tersedianya 375 hasil pengujian produk	BPOM
4.	Penelitian tentang aspek ekonomi tentang pengembangan jamu	1. Uji coba produksi	Tersedianya data studi kelayakan dan proposal riset skala industri			Kementeritk
						Kemenperin, Perguruan Tinggi



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		2. Studi sosial ekonomi (<i>cost benefit effectiveness</i>)	Informasi pasar dan kelayakan usaha		Kemenkoekuin, Kemendag, Kemenin, Kemenhub	BPOM, Perguruan Tinggi
		3. Penelitian tentang aspek kebijakan ekonomi tentang pengembangan jamu	Dihasilkan kebijakan ekonomi Pelaksanaan kebijakan ekonomi yang telah dihasilkan	Dihasilkan kebijakan ekonomi Pelaksanaan kebijakan ekonomi yang telah dihasilkan	Dihasilkan kebijakan ekonomi Pelaksanaan kebijakan ekonomi yang telah dihasilkan	Kemenkoekuin Perguruan Tinggi
	5.	Review Perkembangan dan Pengembangan Jamu	Penyusunan konsep-konsep Jamu	Tersedianya “body of knowledge Jamu”	Berjalananya “body of knowledge jamu” pada dokter yang telah mengikuti diklat saintifikasi jamu	Kementerian perekonomian, Kemenko Kesra, dan Kemenbudpar
6.	Saintifikasi Jamu	Penelitian implementasi ramuan Jamu di pelayanan kesehatan dalam rangka Saintifikasi Jamu	20 ramuan Jamu yang tersaintifikasi	Pengembangan jumlah ramuan Jamu yang disaintifikasi melalui penelitian	Evaluasi	Kemenkes PT, Kementerian

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)				
V. Pengembangan industri Jamu							
1.	Pengembangan Standard dan Pedoman	1. Penyusunan Standar mutu sediaan jamu obat tradisional	Tersedianya 1 (satu) standar mutu sediaan obat tradisional	Terlaksananya revisi dan sosialisasi 1 (satu) standar mutu sediaan obat tradisional	Terlaksananya revisi dan sosialisasi 1 (satu) standar mutu sediaan obat tradisional	Kemenkes, BPOM	Perguruan Tinggi, Kemenkes
		2. Penyusunan pedoman teknologi formulasi berbasis ekstrak	Tersedianya 50 monografi dalam pedoman teknologi formulasi berbasis ekstrak	Tersedianya 75 monografi dalam pedoman teknologi formulasi berbasis ekstrak	Tersedianya 125 monografi dalam pedoman teknologi formulasi berbasis ekstrak	Kemenkes, BPOM	Perguruan Tinggi, Kemenkes
		3. Penyusunan Pedoman Uji Pra Klinik produk	Tersedianya 1 (satu) Pedoman Uji Pra Klinik produk	Terlaksananya revisi dan sosialisasi 1 (satu) Pedoman Uji Pra Klinik produk	Terlaksananya revisi dan sosialisasi 1 (satu) Pedoman Uji Pra Klinik produk	Kemenkes, BPOM	Perguruan Tinggi, Kemenkes
		4. Penyusunan Pedoman Uji Klinik produk	Tersedianya 1 (satu) Pedoman Uji Klinik Produk	Terlaksananya revisi dan sosialisasi 1 (satu) Pedoman Uji Klinik Produk	Terlaksananya revisi dan sosialisasi 1 (satu) Pedoman Uji Klinik Produk	Kemenkes, BPOM	Perguruan Tinggi
2.	Pengembangan Produk Jamu	1. Pengembangan produk sesuai aspek mutu dan bahan alam	setiap tahun 1 produk obat bahan alam	setiap tahun 3 produk obat bahan alam	setiap tahun 15 produk obat bahan alam	Kemenkes, Kementeritek,	Sentra Penelitian, Industri



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		teknologi	yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal dan kompetitif	yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal dan kompetitif	yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal dan kompetitif	Setiap tahun 15 produk obat bahan alam yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	Kemenristek, Kemenkes (Litbangkes)
2.	Uji Pra Klinik terhadap produk		setiap tahun 1 produk obat bahan alam yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	setiap tahun 5 produk obat bahan alam yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	setiap tahun 15 produk obat bahan alam yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	Kemenristek, Kemenkes (Litbangkes)	Centra Penelitian
3.	Uji klinik terhadap produk		setiap tahun 1 produk obat bahan alam yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam	setiap tahun 2 produk obat bahan alam yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam	setiap tahun 3 produk obat bahan alam yang bermutu, aman, dan berkhasiat digunakan dalam	Kemenristek, Kemenkes (Litbangkes)	Centra Penelitian

NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
3.	Pengawasan Mutu Produk Jamu	1. Inspeksi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) 2. Inspeksi CUKB (Cara Uji Klinik yang Baik)	swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	swapengobatan dan pelayanan kesehatan formal	
4.	Bimbingan Industri	3. Pengembangan metode analisis 4. Pengembangan metode analisis	Penyuluhan dan bimbingan teknis produksi kepada pelaku industri (bahan baku, produk	450 produsen jamu mampu menghasilkan produk bersaing segar global	750 produsen jamu mampu menghasilkan produk bersaing segar global	1250 produsen jamu mampu menghasilkan produk bersaing segar global	Kemenkes, BPOM Balai POM, Dinkes, Perguruan Tinggi



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		ruahan, produk jadi)				
2.	Penyuluhan dan bimbingan teknis peningkatan pangsa pasar kepada pelaku industri	Berkembangnya a pasar domestik dan ekspor jamu Indonesia sebanyak 900 produsen jamu	Berkembangnya a pasar domestik dan ekspor jamu Indonesia sebanyak 1200 produsen jamu	Berkembangnya a pasar domestik dan ekspor jamu Indonesia sebanyak 1500 produsen jamu	Kemenkes, BPOM	Balai POM, Dinkes, Kemendag, BPEN, Perguruan Tinggi
3.	Bimbingan teknologi pembuatan ekstrak dan sediaan galenik lainnya.	15% industri mampu menggunakan ekstrak dalam sediaan	30% industri mampu menggunakan ekstrak dalam sediaan	45% industri mampu menggunakan ekstrak dalam sediaan	Kemenkes, BPOM	Balai POM, Dinkes, Kemenristek , Perguruan Tinggi
4.	Bimbingan penerapan CPOTB	industri mampu dalam penerapan CPOTB			Kemenkes, BPOM	Dinkes, balai POM
5.	Pengembangan jumlah produk jamu berbasis penelitian	Dihasilkan 5 industri jamu berbasis penelitian	Dihasilkan 15 industri jamu berbasis penelitian	Dihasilkan 25 industri jamu berbasis penelitian	Kemenko Ekuin, Ristek	Kemenkes, BPOM, Perguruan Tinggi
6.	Pengembangan kualitas industri jamu	1 industri jamu diterima produknya oleh 1 industri	5 industri jamu diterima produknya oleh 3 industri	Seluruh industri jamu diterima produksinya	Kemenko Ekuin	Kemenkes, GP Jamu, PT, BPOM

NO.	STRATEGI/KEBUJUAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	MENENGAH (2015-2020)		
			obat luar negeri	obat luar negeri	oleh seluruh industri obat luar negeri	
5.	Pemetaan Potensi Industri Jamu Nasional	1. Inventarisasi dalam rangka stratifikasi produsen jamu di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan pertumbuhan industri jamu	Terinventarisasi dan terstratifikasi potensi industri jamu sebanyak 30% Industri yang menerapkan CPOTB >30%	Terinventarisasi dan terstratifikasi potensi industri jamu sebanyak 45% Industri yang menerapkan CPOTB > 60%	Terinventarisasi dan terstratifikasi potensi industri jamu sebanyak 65% Industri yang menerapkan CPOTB > 90%	Kemenkes, BPOM Kemenkes, BPOM
VI. Promosi, peningkatan dan perluasan pasar						
1.	Promosi kemanfaatan dan pengembangan pasar	1. Fasilitasi penyelenggaraan Festival Jamu 2. Melaksanakan pameran di dalam dan luar negeri 3. Melaksanakan Bursa Penelitian 4. Sosialisasi melalui	Beberapa industri obat luar negeri yang bekerjasama dengan Industri jamu nasional 7 produk jamu di pasar global	5 industri obat luar negeri yang bekerjasama dengan industri jamu nasional 12 produk jamu di pasar global	15 industri obat luar negeri yang bekerjasama dengan industri jamu nasional 25 produk jamu di pasar global	Kementerian (BPSDM, Ditjen Hortikultura, Ditjen PPHP, Balitro) Kemenkes Kementerian Tinggi, LPI, Kemenristek, Lembaga Penelitian Semua instansi BPPT,



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	PENDEK (-2014)	SASARAN MENENGAH (2015-2020)	PANJANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		media cetak dan media elektronik.				Semua instansi	Menkominfo Pemda, Media

NO.	STRATEGI/KEBUJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN MENENGAH (2015-2020)		PANJIANG (2021-2025)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)				
VII. Integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan							
1.	Jamu menuju pelayanan formal	1. Peningkatan jumlah produk jamu yang digunakan dalam fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas	Dihasilkan 20 produk jamu yang digunakan dalam pelayanan kesehatan	Dihasilkan 30 produk jamu yang digunakan dalam pelayanan kesehatan	Dihasilkan 30 produk jamu yang digunakan dalam pelayanan kesehatan	Kemenkes	PT, IDI, Asosiasi Keilmuan
		2. Peningkatan jumlah rumah sakit yang menggunakan produk jamu dalam pelayanan kesehatan	70 rumah sakit menggunakan produk jamu dalam pelayanan kesehatan	175 rumah sakit menggunakan produk jamu dalam pelayanan kesehatan	315 rumah sakit menggunakan produk jamu dalam pelayanan kesehatan	Kemenkes	PT, IDI, Asosiasi Keilmuan
		3. Peningkatan jumlah Puskesmas yang menggunakan produk jamu dalam pelayanan kesehatan	500 Puskesmas menggunakan produk jamu dalam layanan kesehatan	1250 Puskesmas menggunakan produk jamu dalam layanan kesehatan	2250 Puskesmas menggunakan produk jamu dalam layanan kesehatan	Kemenkes	PT, IDI, Asosiasi Keilmuan
2.	Integrasi Jamu dalam pelayanan kesehatan formal	Operasionalisasi Jamu sebagai layanan di Rumah Sakit	Tersedianya 5 RS yang menyelenggarakan Jamu	Tersedianya 12 RS yang menyelenggarakan Jamu	Seluruh RS menyelenggarakan Jamu	Kemenkes	IDI, Asosiasi Keilmuan



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
VIII. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan						
1.	Pengembangan Skema Permodalan untuk Agribisnis/Agro-industri Berbasis Tanaman Obat	1. Bantuan Permodalan untuk Agribisnis Bahan Baku Jamu	1. Kajian Permodalan untuk Agribisnis Berbasis Tanaman Obat	Implementasi Skema Permodalan	Kemenko/ MenkoEkuin	Perguruan Tinggi
			2. Sosialisasi Permodalan untuk Agribisnis Berbasis Tanaman Obat		Kemenko/ MenkoEkuin	Perguruan Tinggi
2.	Penguatan Modal/kemitraan	2. Fasilitasi pendanaan mendukung tanaman obat di lahan pekarangan atau TOGA	Penyediaan dana di kawasan intensif	Penyediaan dana di kawasan intensif	Kemenkes, Kementan	Perguruan Tinggi
		1. Fasilitasi Pembiayaan (APBN) melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan			Ditjen Hortikultura, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kemenkop, Kemenkes	BPOM
		2. Penyusunan skema pembiayaan/per modalan untuk usaha jamu	Dihasilkan rancangan pembiayaan dan pemodal	Implementasi rancangan pembiayaan dan pemodal	Evaluasi terprogram terhadap implementasi pembiayaan	BPOM

NO.	STRATEGI/KEBUJUAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (2014)	MENENGAH (2015-2020)		
			terkait jamu	terkait jamu	dan pemodalan terkait jamu	
IX. Pengembangan sistem informasi dan perlindungan HKI Jamu (Ubah menjadi sub program)						
1.	Sistem informasi jamu (Jamu Net)	1. Membangun sistem informasi dan database industri jamu 2. Informasi sentra produksi	Sebaran pasar/konsumen dan tingkat kebutuhan bahan baku (jenis dan jumlah) Penyediaan data dan informasi kelembagaan di sentra produksi		Kemenkominfo Kementerian Kemenkes	PT, Kementerian Kemenkes
2.	Regulasi untuk perlindungan HKI / paten produk jamu	Penyusunan Peraturan pemerintah guna perlindungan/paten produk jamu	Sosialisasi		Kemenhukham Kemenkes, BPOM	Kemenhukham Kemenkes, BPOM



NO.	STRATEGI/KEBIJAKAN/ SUBPROGRAM	AKTIVITAS	SASARAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			PENDEK (-2014)	MENENGAH (2015-2020)		
		Peraturan pemerintah guna perlindungan/paten produk jamu				BPOM
X. Pemanfaatan dan pelestarian budaya pemanfaatan jamu						
3.	Peningkatan Perolehan HKI untuk produk-produk terkait jamu	Pengajuan Hak Paten	Dihasilkan 7 Paten terkait jamu	Dihasilkan 15 Paten terkait jamu 5 paten digunakan industri untuk produksi jamu	Kemenhukham	Kemenkes, PT, BPPT, LIPI

